

PANDANGAN DPRD KOTA CIREBON SEBAGAI KOTA WALI  
TERHADAP KEBEBASAN BERINTERNET YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN SYARI'AT ISLAM

LAPORAN PENELITIAN INDIVIDU MANDIRI



Dr. H. Kosim, M.Ag  
NIP. 196401041992031004

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI  
CIREBON  
2013

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha pendidik hambah-hambahnya, Tuhan yang Maha pemberi ilmu pengetahuan dan pemberi petunjuk, berkat rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian ini. Shalawat dan dilimpahkan kepada salam muda-mudah Nabi akhiruzaman Rasulullah saw amiin.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepala :

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksum Mukhtar, M.A selaku Rektor IAIN Syekh Nurjatati Cirebon
2. Bapak Dr. Ilman Nafi,a , M.Ag selaku Kepala Lembaga Penelitian IAIN Syekh Nurjatati Cirebon
3. Semua pihak yang telah membatu terselesaikannya penelitian

Hasil penelitian tentang masalah pandangan DPRD kota cirebon sebagai kota wali terhadap kebebasan internet ini, tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan oleh karena itu kritik dan saran oleh para ahli sangat ditunggu untuk lebih sempurnnya hasil penelitian ini, namum hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat untuk semua yang membacanya amiin.

Cirebon Desember 2013

Peneliti

Dr. H. Kosim, M.Ag

NIP.196401041992031004



IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN KOMPETITIF INDIVIDUAL

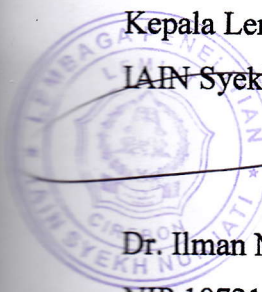
1. A. Judul Penelitian : Pandangan DPRD kota Cirebon sebagai kota wali terhadap kebebasan internet  
B. Jenis Penelitian : Kualitatif  
C. Wilayah Penelitian : Wilayah Penelitian ini adalah wilayah kajian Fiqh Siyasah
2. Peneliti  
A. Nama : Dr. H. Kosim, M.Ag  
B. Jenis Kelamin : Laki-laki  
C. Pangkat/Golongan : IV/a  
D. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
3. Lokasi Penelitian : DPRD Kota Cirebon
4. Jangka Waktu : 3 bulan

Cirebon, Desember 2013

Mengetahui

Kepala Lembaga Penelitian

IAIN Syekh Nurjati Cirebon



Dr. Ilman Nafi'a, M.Ag

NIP.197212201998031004

Peneliti,

Dr.H.Kosim, M.Ag

NIP.196401041992031004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Identitas dan Pengesahan.....	ii
Transliterasi Arab Indonesia .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I PENADAHULUAN</b>	
A. Latarbekang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Landasan Teori.....	7
E. Metodologi Penelitian .....	37
F. Langkah-langkah Penelitian.....	37
G. Waktu Penelitian .....	37
H. Personalia Penelitian.....	37
I. Anggaran Biaya .....	38
<b>BAB II KONDISI OBYEKTIF KOTA CIREBON</b>	
A. Letak Geografis .....	39
B. Sejarah .....	40
C. Pemerintahan .....	42
D. Alat Kelengkapan Pemerintah.....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pandangan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Ketua Fraksi PDI-P.	47
B. Pandangan Anggota DPRD KOTA CIREBON Praksi GERINDRA.	50
C. Pandangan Anggota DPRD KOTA CIREBON FRAKSI PKS.....	52
D. Pandangan Anggota DPRD Kota Cirebon Fraksi HANURA.....	55
E. Pandangan Anggota DPRD Kota Cirebon Fraksi Demoktrat .....	56
F. Pandangan Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi PAN.....	59
G. Pandangan Anggota DPRD Kota Cirebon Fraksi Golkar.....	62



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN

#### A. Pandangan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Ketua Fraksi PDI-P

##### 1. Tempat Dan Waktu memperoleh data

Acara ini dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 30 Desember 2013  
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Kantor Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon  
(Jl.Siliwangi No.90 Kota Cirebon)  
Narasumber : Bapak Edi Suripno, SIP, M.SI (Wakil Ketua  
DPRD Kota Cirebon, Ketua Fraksi PDI-P)

Pengumpul data melalui wawancara adalah Mahasiswa semester VIII

Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah yaitu :

1. Arif Fajar Muakhkhor (1410210004)
2. Daryanto (1410210005)
3. Muhammad Harits (1410210014)
4. Nurul Amalia (1410210016)
5. Risyah Masruroh A. (1410210020)

##### 2. Hasil Wawancara

- a. Pendapat Anggota Dewan Mengenai Kebebasan Berinternet yang Tidak sesuai dengan Syari'at Islam

*Menurut Bapak Edi Suripno, kebebasan berinternet yang tidak sesuai dengan syari'at Islam itu sangatlah ironi bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dikemukakan beliau bahwa Bangsa Indonesia ini berjati diri luhur, sebagaimana tertuang dalam UUD Negara 1945; dasar negara Indonesia dan sekaligus merupakan pandangan hidup bangsa. Di dalamnya terdapat Pancasila, yang mana sila-sila Pancasila terdapat kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang sudah*

berurat akar. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur itu merupakan jati diri bangsa yang menjadi cita-cita moral yang perlu diwujudkan.

Pada dasarnya menurut beliau, dengan kemudahan akses internet terdapat pengaruh positif dan negatifnya. Internet yang berpengaruh positif apabila internet tersebut digunakan untuk mengakses ilmu pengetahuan, namun, bila banyak situs-situs yang sangat bebas akses dan tanpa akses situs tersebut muncul tanpa diinginkan, serta situs-situs tersebut sangat berseberangan dengan syari'at Islam dan ideology bangsa yang luhur, hal tersebut sangat berpengaruh negatif. Maka, dengan adanya tantangan globalisasi yang semakin menggila ini, salah satunya kebebasan berinternet sangatlah merugikan dan merusak mental bangsa.

Selain kebebasan berinternet yang tidak terfilter tersebut dapat melemahkan budaya bangsa yang luhur bangsa, kebebasan tersebut dapat melemahkan perilaku sikap mental bangsa, terutama bagi generasi muda penerus bangsa dan masyarakat keseluruhannya.

Selain itu pula menurut beliau, kebebasan tersebut dapat menimbulkan budaya yang sangat tidak baik, yakni pergaulan bebas atau *free sex* dan juga dapat meningkatkan kriminalitas, yang leseluruhannya itu sangat merugikan bangsa. Akhirnya menurut beliau, hal tersebut dapat dibendung apabila Negara melarang ataupun mempunyai kebijakan terkait hal tersebut.

- b. Pendapat Anggota Dewan mengenai Negara yang belum mengatur bebasnya akses Internet

Menurut beliau, globalisasi merupakan hal yang baik bagi keberlangsungan Republik Indonesia. Tanpa globalisasi kita akan tertinggal dengan bangsa-bangsa yang lain. Tak diragukan lagi bahwa globalisasi adalah hal yang baik. Diantaranya dampak positifnya adalah semakin majunya teknologi di Indonesia dan tak kalah dengan Negara lain. Tapi disamping itu globalisasi juga mempunyai dampak negatif atau efek samping yang buruk bagi rakyat Indonesia. Diantaranya



adalah narkoba, hilangnya budaya kita sebagai budaya bangsa Indonesia dan yang lebih parah adalah menganggap segala budaya bangsa barat lebih baik dari pada budaya bangsa Indonesia sendiri.

Maka dari itu diperlukan sebuah filter atau penyaring arus globalisasi yang begitu kencang ini agar tidak semua budaya barat masuk ke indonesia, agar yang baik dapat diterima dan yang buruk tidak diterima dan lebih baik di buang saja.

Mengenai Negara yang belum mengatur kebijakan mengenai kebebasan berinternet ini, menurut beliau hal tersebut masih dalam tahap. Selain itu, perlu diingat kembali untuk memfilter akses bebas internet dapat dimulai dari diri individu terlebih dahulu. Selain itu, semua anggota masyarakat berperan aktif, baik ulama, pemikir/cendikia, pemerintah dan segenap masyarakat berusaha berperan aktif untuk tidak mengakses hal-hal yang merusak moral bangsa dan juga saling mengingatkan kepada sesama. Adapun mengenai situs bebas tanpa akses yang muncul diperlukan filterisasi untuk hal tersebut. Ini dapat diatasi dengan teknologi pemancar maupun radiologi yang dapat memfilter hal-hal tersebut. Diperlukan tim ahli dan padat modal untuk mengusahakannya sembari mengusahakan adanya kebijakan mengenai kebebasan berinternet.

Untuk saat ini menurut beliau, dasar yang dapat menjadi filter bangsa ialah Pancasila. Sejak dahulu pancasila menjadi pedoman dan cara hidup rakyat Indonesia, begitu kuatnya pancasila mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan salah filter yang tepat untuk menyaring globalisasi sehingga tidak semua budaya luar dapat masuk begitu saja.

- c. Apakah ada rencana Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cirebon untuk membuat perda yang berkenaan dengan kebebasan berinternet yang tidak sesuai dengan syari'at Islam ?

Untuk membentuk perda yang berkenaan dengan Kebebasan Berinternet, menurut Bapak Edi Suripno, Ketua fraksi PDI-P, hal

tersebut tidak menutup kemungkinan dijalankan tahapan-tahapan untuk menuju pembentukan kebijakan tersebut. Karena di Kota Cirebon ini pun, terdapat Perda baru yang telah dibentuk dan sangat mendukung moral dan sikap mental bangsa ini, yakni Larangan Peredaran dan Pengonsumsi Minuman Beralkohol dan juga Kewajiban Diniyah Takmiliah. Sehingga pembentukan Perda yang berkenaan dengan kebebasan berinternet pun dapat diusahakan, karena hal tersebut dapat menjaga dan mendukung moral, budaya luhur bangsa dan seirama dengan syari'at Islam.

## **B. Pandangan Anggota DPRD KOTA CIREBON Praksi GERINDRA**

### **1. Tempat Dan Waktu memperoleh data**

Acara ini dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 30 Desember 2013  
 Pukul : 08.30 WIB s/d selesai  
 Tempat : Kantor Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon  
 (Jl.Siliwangi No.90 Kota Cirebon)

Profil Narasumber :

Nama : H.Eman Suleman  
 Umur : 55 Tahun  
 Jabatan : Anggota Komisi B, Sekretaris Gabungan Fraksi  
 Fraksi : Gerindra

Pengumpul data melalui wawancara adalah Mahasiswa semester VIII

Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah yaitu :

- 1. IsmatulMaula**
- 2. Abdul Qoyum**
- 3. LutfiAbdillah**
- 4. Qodariah**



## 2. Hasil wawancara

- a. Pendapat Anggota Dewan Mengenai Kebebasan Berinternet yang Tidak sesuai dengan Syari'at Islam.

Menurut H. Eman Suleman : Ya memang benar dalam pennggunaan internet ini memicu dampak, baik itu dampak positif dan negatif dalam pandang syar'at Islam, tapi kita juga sangat membutuhkan, hal ini juga dapat mempengaruhi mentalitas dan kualitas generasi bangsa, maka harus dilakukan pengawasan ekstra maksimal dalam hal pemanfaatan juga bisa melalui sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat untuk pemanfaatan internet yang positif.

- b. Pendapat Anggota Dewan mengenai Negara yang belum mengatur tentang kebebasan akses Internet.

Selanjutnya menurut beliau bahwa selama ini daerah belum mengatur atau membuat regulasi terkait penggunaan internet, mungkin nanti bisa di pertimbangkan dan disampaikan aspirasinya, namun dalam lingkup perda tentunya harus berdasarkan dan mengacu pada hirarki undang-undang dan perundang-undangan yang telah mengatur hal tersebut, juga penggunaan internet itu disemua daerah, maka ini harusnya menjadi program legislasi nasional (prolegnas), jika hanya berbicara perda maka lingkungnya sangat kecil, mungkin ini bisa diberlakukan di daerah-daerah yang sudah menggunakan syari'at Islam. Internet dan situs lainnya menjadi trend di semua kalangan, tentunya ada dampak positif

- c. Apakah ada rencana Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cirebon uuntuk membuat perda yang berkenaan dengan kebebasan berinternet yang tidak sesuai dengan syari'at Islam?

Ya tentunya dalam membuat sebuah aturan perlu adanya kajian mendalam, tidak hanya asal membuat kemudian harus dilakukan kerjasama dengan dengan dinas terkait, misalkan dengan dinas perhubungan, dinas informatika dan lain-lain juga materi peraturan harus memuat landasan filosofis, yuridis dan sosiologisnya dan diperlukannya Naskah akademik yang menjadi acuan aturan itu buat dan tenaga ahli serta akademisi, ya Insya Allah akan kami sampaikan hal ini ke pemerintahan terkait yang berwenang, dan kami mendukung karena ini positif dalam rangka pembangunan dan meningkatkan kualitas dan mentalitas untuk generasi bangsa yang baik.

### C. Pandangan Anggota DPRD KOTA CIREBON FRAKSI PKS

#### 1. Tempat Dan Waktu memperoleh data

Acara ini dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Jum,at, 27semer 2013  
 Pukul : 08.30 WIB s/d selesai  
 Tempat : Kantor Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon  
 (Jl.Siliwangi No.90 Kota Cirebon)

ProfilNarasumber :

Nama Lengkap : Taufik Pratidina, ST  
 Jabatan : Sekretaris Komisi C (Pendidikan, Kesehatan dan Sosial)  
 Email : [taufik\\_pratidina@yahoo.com.sg](mailto:taufik_pratidina@yahoo.com.sg)

#### 2. Pengumpul data melalui wawancara adalah Mahasiswa semester VIII

Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah yaitu Oleh:

- a. Samsu
- b. M. Rifqi
- c. Abdul Wahid
- d. Uswatun Hasanah
- e. Tuti Alawiyah
- f. Melia

#### 3. Hasil Wawancara

- a. Pendapat Anggota Dewan Mengenai Kebebasan Berinternet yang Tidak sesuai dengan Syari'at Islam

Menurut Taufik Pratidina, ST mengenai penampilan-penampilan yang tidak sesuai di internet tentu saja hal tersebut sangat tidak pantas. Pelarangan hal tersebut bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang sesungguhnya yaitu jika perbuatan itu mengorbankan hal-hal yang lebih banyak, menimbulkan madharat yang lebih besar. Bapak Taufik sebagai salah satu kader PKS sangat mendukung kebijakan Menkominfo, Bapak Tifatul Sembiring bahwa situs-situs yang tidak benar harus secepatnya



di blokir dan diwaspadai setiap saat adanya indikasi-indikasi situs-situs baru yang berkedok situs biasa padahal didalamnya berisi hal-hal yang tidak baik karena memang pengawasan itu tidak hanya dilakukan satu-dua kali ketika sedang marak saja, akan tetapi terus menerus agar tidak memberikan dampak buruk terhadap para pengguna internet.

- b. Pendapat Anggota Dewan mengenai Negara yang belum mengatur tentang kebebasan akses Internet

menurut beliau mengenai konsep perumusan materi di Selanjutnya DPRD yang kemudian diajukan ke DPR RI supaya negara mensensor tampilan-tampilan yang tidak baik yang muncul di internet, hal tersebut belum dilakukan, karena dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) yang dalam hal ini dikepalai oleh Bapak Tifatul Sembiring yang juga dari fraksi PKS sudah melakukan pemblokiran situs-situs yang dinilai tidak baik dan tidak layak untuk ditampilkan. Meskipun begitu, tetap saja masih ada situs-situs yang lolos dari pemblokiran dan dapat dengan mudah diakses oleh setiap orang.

Dalam hal ini, Bapak Taufik Pratidina menanggapi bahwa pelaksanaan kebijakan pemblokiran tersebut tidak dapat sepenuhnya efektif jika hanya dilakukan oleh Kemenkominfo saja, akan tetapi seyogyanya unsur-unsur terkait pun dapat bersama-sama mendukung penuh kebijakan tersebut. Selain itu, kesadaran internal di diri masing-masing individu di seluruh lapisan masyarakat pun perlu dilakukan, bahwa hal tersebut tidak hanya berdampak buruk terhadap anak-anak saja, bahkan terhadap orang dewasa pun juga dapat memicu terjadinya tindakan-tindakan kriminal.

Mengenai efektivitas kebijakan Kemenkominfo ini juga tidak terlepas dengan sosialisasi manfaat dan bahaya internet ke seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum remaja yang merupakan "korban utama" dari keberadaan situs-situs tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Taufik yang dipercaya menjadi wakil rakyat di

bidang Pendidikan Kota Cirebon, sempat mengusulkan adanya regulasi Kewajiban adanya Pendidikan Keagamaan di sekolah-sekolah umum di seluruh Kota Cirebon. Karena menurut beliau, pendidikan agama menjadi benteng bagi setiap individu untuk menghadapi krisis moral dan akhlak yang ditimbulkan dari bahaya internet tersebut.

Hal tersebut menurut beliau merupakan salah satu solusi yang dinilai efisien, dapat dilakukan dalam waktu dekat. Bisa saja DPRD mengusulkan konsep materi RUU yang kemudian diteruskan ke DPR dan menjadi sebuah konstitusi, akan tetapi hal tersebut akan menuai banyak kontroversi, menghabiskan banyak dana dan memakan waktu yang lama. Itupun belum tentu sah menjadi undang-undang, banyak juga RUU yang telah menghabiskan biaya yang tidak sedikit ujung-ujungnya gagal menjadi undang-undang yang sah seperti dalam pembuatan RUU Pornoaksi dan Pornografi. Untuk menyamakan persepsi batasan mana yang dianggap porno dan mana yang tidak sangat sulit dilakukan, mengingat bahwa negara kita merupakan negara dengan berbagai macam suku, adat dan budaya.

- c. Apakah ada rencana Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cirebon untuk membuat perda yang berkenaan dengan kebebasan berinternet yang tidak sesuai dengan syariat Islam?

Kemudian, harapan beliau terkait kebebasan internet bahwa pemerintah terutama pemimpin-pemimpin daerah agar bisa lebih tegas dan maksimal dalam menanggapi hal tersebut. Para pejabat lain pun yang menduduki kursi yang sama seperti halnya Bapak Taufik dimanabeliau sebagai sekretaris Komisi C DPRD Kota Cirebon yang menangani masalah Pendidikan, Kesehatan dan Sosial harus berusaha dengan sebaik-baiknya memegang amanah rakyat, berjuang demi kepentingan rakyat dengan melakukan hal-hal yang mampu dilakukan di dalam bidangnya seperti dengan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kota Cirebon dengan menaikkan anggaran pendidikan agar lebih layak dan berkualitas sehingga



Cirebon bisa lebih maju. Dan harapannya juga sudah DPRD Kota Cirebon membuat perda terkait dengan internet.

#### **D. Pandangan Anggota DPRD Kota Cirebon Fraksi HANURA**

##### **1. Tempat Dan Waktu memperoleh data**

Acara ini dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Jum,at, 27seember 2013  
 Pukul : 08.30 WIB s/d selesai  
 Tempat : Kantor Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon  
 (Jl.Siliwwangi No.90 Kota Cirebon)  
 Narasumber : Ibu Een Rusmiyati Selaku Anggota DPRD Kota Cirebon Praksi Partai HANURA

2. Pengumpul data melalui wawancara adalah Mahasiswa semester VIII Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah yaitu Oleh:

- a. **AndriNazarudin M (1410210002)**
- b. **ZaenalAbidin(1410210023)**
- c. **IinInayah (1410210008)**
- d. **Eka Gita R (1410210006)**
- e. **Nou'imhayat (14102100 )**

##### **3. Hasil wawancara**

- a. Pendapat Anggota Dewan Mengenai Kebebasan Berinternet yang Tidak sesuai dengan Syari'at Islam

Menurut Ibu EEN Rusimiyati bahwa Internet merupakan pelengkap terhadap kemajuan keilmuan di bidang teknologi modern yang mempunyai peran penting namun kebebasan internet akan berdampak negatip tidak ada kontrol dari pemerintah maka perludi buatkan undang-undang dan ada bimbingan dari keluarga terhadap anak-anaknya dalam akses internet kemudian didukung dengan pendidikan agama yang maksimal.

- b. Pendapat Anggota Dewan mengenai Negara yang belum mengatur tentang kebebasan akses Internet

Menurut beliau bahwa Internet merupakan pelengkap terhadap kemajuan keilmuan di bidang teknologi modern yang mempunyai peran penting namun kebebasan internet akan berdampak negatif jika tidak ada kontrol dari pemerintah maka perludi buat undang-undang dan ada bimbingan dari keluarga terhadap anak-anaknya dalam msngakses internet kemudian didukung dengan pendidikan agama yang maksimal

- c. Apakah ada rencana Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cirebon uuntuk membuat perda yang berkenaan dengan kebebasan berinternet yang tidak sesuai dengan syari'at Islam?

Berkenaan dengan konsep apakah DPRD kota Cirebon Akan merumuskan Undang-Undang tentang kebebasan internet yang ditujukan kepada DPR RI dalam hal ini terhadap tampilan-tampilan yang bebau pormografi, karena bisa mengakibatkan efek negatif terhadap generasi penerus bangsa. Hal itu secara tidak langsung internet menawarkan pembelajaran terhadap pengenalan seks pada usia dini, namun untuk membentuk peraturan apalagi undang-undang yang ruanglingkupnya nasional tentu perlu membutuhkan banyak proses dan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam hal ini badaninformatika dan teknologi.

#### **E. Pandangan Anggota DPRD Kota Cirebon Fraksi Demokrat**

##### **1. Tempat Dan Waktu memperoleh data**

Acara ini dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Jum,at, 27semer 2013

Pukul : 08.30 WIB s/d selesai

Tempat : Kantor Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon  
(Jl.Siliwwangi No.90 Kota Cirebon)

Narasumber : Drs. Salmon merupakan salah satu anggota  
DPRD dari fraksi Demokrat

2. Pengumpul data melalui wawancara adalah Mahasiswa semester VIII  
Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah yaitu Oleh:



- a. Akhmad Zamzami
- b. Ariyanto
- c. Dini Fitriyani
- d. Lilis Kustinah Sari
- e. Nono Haryono
- f. Nurfatikhah

### 3. Hasil wawancara

- a. Pendapat Anggota Dewan Mengenai Kebebasan Berinternet yang Tidak sesuai dengan Syari'at Islam

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya Internet, telah menjadi kekuatan pendorong baru bagi lahirnya, atau lebih tepatnya penemuan kembali masyarakat sipil. Yaitu, terbentuknya jaringan gabungan dari organisasi, kelompok, dan gerakan masyarakat sipil yang bertujuan untuk mencapai berbagai agenda madani seperti demokratisasi dan kebebasan informasi pada berbagai tingkat baik lokal, nasional, regional maupun global.

Pesatnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia menimbulkan banyak persoalan baru. Salah satunya adalah tentang kebijakan pengendalian konten internet yang dilarang. Pemblokiran konten internet (*internet censorship*) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan banyak pihak. Akan tetapi, secara normatif belum ada ketentuan spesifik yang mengamanatkan pemerintah untuk melakukan pembatasan hak atas informasi dalam bentuk sensor terhadap konten internet.

Mengenai penampilan-penampilan yang ada di internet yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, beliau bukannya membiarkan penampilan tersebut. Akan tetapi, lagi-lagi beliau menyampaikan alasannya mengenai kekurangannya dalam bidang tersebut, yaitu dalam soal internet. Sebenarnya alasan mengenai Hak Asasi Manusia untuk mengekspresikannya dalam kebebasan internet itu kurang tepat karena dalam setiap ruang lingkup persoalan mempunyai batasan atau norma-norma yang membatasinya. Beliau menyarankan kepada mereka yang

menguasai internet dan mengetahui kodenya agar menyeleksi tampilan-tampilan yang kurang baik atau dengan mensensor tampilan tersebut.

- b. Pendapat Anggota Dewan mengenai Negara yang belum mengatur tentang kebebasan akses Internet

Menurut beliau kebebasan internet yang menyuguhkan tampilan-tampilan yang tidak baik merupakan pembiaran terhadap dekadensi moral. Maka dari itu, perlu adanya upaya dari pemerintah yaitu suatu kebijakan yang dapat mengarah pada terbentuknya generasi bangsa yang bermoral yaitu dengan mensensor atau menyeleksi tampilan-tampilan di internet yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan sikap dan moral penggunanya.

- c. Apakah ada rencana Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cirebon untuk membuat perda yang berkenaan dengan kebebasan berinternet yang tidak sesuai dengan syari'at Islam?

Menurut Drs. Salmon merupakan salah satu anggota DPRD dari fraksi Demokrat yang memberikan tanggapannya terhadap kebebasan internet. Menurut beliau sejauh ini kami dari transformer belum mempunyai konsep untuk dirumuskan di DPRD Kota Cirebon yang kemudian diajukan ke DPR RI terkait dengan kebebasan internet, alasan yang beliau kemukakan yaitu karena beliau kurang memperhatikan masalah internet dan hal tersebut bukan termasuk bidangnya sehingga beliau kurang menguasai bidang tersebut. Akan tetapi, beliau mempunyai harapan bahwasanya kebebasan internet harus ditindak lanjuti oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan supaya kebebasan tersebut tidak memberikan dampak yang negatif terhadap pengguna internet terutama generasi muda yang menjadi cikal bakal penerus bangsa.

Wawancara yang kami lakukan terkait kebebasan internet kepada anggota DPRD Kota Cirebon disambut baik oleh Ketua DPRD Kota Cirebon dari fraksi Demokrat yaitu Bapak Yuliarso, beliau menyarankan kepada kami untuk melakukan wawancara kepada bapak Drs. Salmon anggota DPRD dari fraksi demokrat.



Saat kami bertemu dengan Bapak Drs. Salmon beliau kebetulan sedang terburu-buru karena hendak ziaroh, sehingga wawancara yang kami lakukan dengan beliau hanya sebentar. Namun, dari hasil wawancara tersebut kami dapat menarik suatu kesimpulan bahwasanya meskipun beliau kurang begitu paham di bidang informasi dan komunikasi (internet), mungkin karena beliau sudah tua (umurnya sekitar 60 tahun lebih), akan tetapi beliau mempunyai perhatian besar terhadap kebebasan internet. Beliau sangat berharap kepada pemerintah untuk melakukan suatu kebijakan terkait dengan kebebasan internet yang apabila tetap dibiarkan akan merusak moral generasi bangsa.

Dengan demikian, kita harapkan dengan adanya wawancara ini menggugah hati dan keinginan dari DPRD Kota Cirebon untuk melakukan rumusan yang berkenaan dengan kebebasan internet yang untuk tahap selanjutnya dapat diajukan ke DPR RI sebagai Rancangan Undang Undang yang dapat memberikan ilustrasi hukum guna membatasi penggunaan internet yang mengarah pada dampak yang negatif. Selain hal tersebut, tahap berikutnya yaitu perlu adanya sosialisasi dari DPRD Kota Cirebon berkenaan dengan dampak dari kebebasan internet

#### **F. Pandangan Anggota DPRD Kota Cirebon Komisi A dari Fraksi PAN**

##### **1. Tempat dan waktu memperoleh data :**

Hari/tanggal : Rabu/11 Desember 2013

Pukul : 16.00 s.d. selesai

Tempat : Jl. Cendrawasih II Penggung Utara, Rumah Kediaman  
Bapak Dani Mardani, SH. MH.

Narasumber : Bapak Dani Mardani, SH. MH (Komisi A DPRD Kota  
Cirebon)

##### **2. Pengumpul data melalui wawancara adalah Mahasiswa semester VIII**

Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah yaitu Oleh:

**a. Ayu Wulandari**

**b. Eman Sukmana**

**c. Linda Jaziroh**

**d. Sri Danawati**

**e. Syaefulloh**

**f. Urifah Rokhatul Jannah**

**3. Hasil wawancara**

- a. Pendapat Anggota Dewan Mengenai Kebebasan Berinternet yang Tidak sesuai dengan Syari'at Islam.**

Ya, benar sekali saudara-saudara sekalian anak-anakku mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillah, kami dari segenap jajaran pejabat DPRD Kota Cirebon telah mempunyai perhatian khusus dan intensive mengenai kebebasan dalam menggunakan internet, karena kami menyadari akan kepedulian terhadap tontonan masyarakat, terutama generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa, dengan tontonan yang baik kami berharap bisa menjadi tuntunan bagi masyarakat. Terkait dengan pertanyaan saudara, kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon mengenai kebebasan menggunakan internet yaitu dengan mengadakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Internet yang saat ini menjadi konsumsi masyarakat dan berperan banyak bagi masyarakat baik itu dari segi pendidikan, ekonomi dan kesehatan serta tidak menutup kemungkinan banyak yang menyalahgunakan penggunaan kecanggihan internet. Internet dapat digunakan oleh semua golongan, hal ini didasarkan pada Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dibentuk dari dan untuk masyarakat. Diharapkan masyarakat membuka internet untuk hal yang positif. Cara menyampaikan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi dan penyuluhan agar masyarakat lebih selektif dalam menggunakan internet. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dibentuk oleh DPRD Kota Cirebon pada Komisi Informasi Publik. Komisi ini sudah dibentuk selama 1 tahun, sebelum ini Komisi Informasi Publik sudah dibentuk sejak tahun 2008, hanya saja tidak berjalan efektif dikarenakan tidak adanya pembinaan. Masyarakat sangat responsif dengan adanya KIM karena sebagai kebutuhan primer dalam pencarian informasi.



Harapan selanjutnya DPRD Kota Cirebon mengadakan KIM di setiap Kelurahan.

b. Pendapat Anggota Dewan mengenai Negara yang belum mengatur tentang kebebasan akses Internet

Tentu saja tidak anak-anakku sekalian, Hak Asasi Manusia bukanlah alasan untuk melegalkan Pornografi dan tontonan yang tidak pantas, karena dengan begitu maka akhlak masyarakat Indonesia akan semakin terkikis. Dan budaya/adat ketimuran yang terkenal dengan sopan santunya akan musnah jika hal ini dibiarkan saja. Penampilan-penampilan yang tidak pantas yang ditayangkan di internet sebenarnya bukanlah berasal dari Bangsa kita, melainkan dari budaya barat dengan globalisasi maka semua informasi dari mana saja akan dengan mudah masuk ke Negeri kita. Maka dari itu kita harus mempunyai benteng yang kuat yaitu agama dan moral, agar semua budaya yang masuk dari barat bisa di filterisasi/disaring sebelum masuk ke Indonesia khususnya Kota Cirebon. Konsep kami yaitu dengan membagikan stiker-stiker anti ponografi ke semua penyedia jasa internet, dan bekerjasama dengan mereka agar memblokir orang yang membuka situs-situs yang tidak baik. Dan untuk kedepannya kami berharap agar ini bisa menjadi suatu Undang-undang yang disahkan secara Nasional di seluruh Indonesia tidak hanya di Cirebon.

c. Apakah ada rencana Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cirebon untuk membuat perda yang berkenaan dengan kebebasan berinternet yang tidak sesuai dengan syari'at Islam?

Tanggapan saya secara pribadi jika Pemerintah tidak mensensor tayangan-tayangan yang tidak baik itu berarti kurangnya kepedulian Pemerintah terhadap moral dan akhlak masyarakatnya, yang menandakan telah hilangnya jati diri kita sebagai kota Wali khususnya Cirebon. Tetapi saya mengajak kepada semua lapisan masyarakat, baik itu kelurahan, RT, RW dan bahkan Keluarga sekalipun ayo semuanya kita selamatkan akhlak dan moral kita dari tayangan-tayangan yang tidak baik, karena tanpa adanya kesadaran dari diri sendiri menurut saya susah untuk dikendalikan,

Pemerintah terhadap moral dan akhlak masyarakatnya, yang menandakan telah hilangnya jati diri kita sebagai kota Wali khususnya Cirebon. Tetapi saya mengajak kepada semua lapisan masyarakat, baik itu kelurahan, RT, RW dan bahkan Keluarga sekalipun ayo semuanya kita selamatkan akhlak dan moral kita dari tayangan-tayangan yang tidak baik, karena tanpa adanya kesadaran dari diri sendiri menurut saya susah untuk dikendalikan, tetapi jika sudah terbiasa dari diri sendiri maka dengan sendirinya moral kita akan terjaga dan terpelihara dengan baik. Dan jika kebebasan internet ini sudah melewati batasnya maka saya rasa diperlukan sebuah gerakan yang kompak dari seluruh jajaran masyarakat untuk menolaknya jika tidak ada gebrakan dari Pemerintah, karena inti dari demokrasi adalah Permerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyat.

#### **G. Pandangan Anggota DPRD Kota Cirebon Fraksi Golkar**

##### **1. Tempat Dan Waktu memperoleh data**

Acara ini dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal	: Jum,at, 27semer 2013
Pukul	: 08.30 WIB s/d selesai
Tempat	: Kantor DPRD Kota Cirebon (Jl.Siliwwangi No.90 Kota Cirebon)
Narasumber	: Lili Eliyah SH. MH merupakan salah satu anggota DPRD komisi B dari fraksi Golkar

##### **2. Pengumpul data melalui wawancara adalah Mahasiswa semester VIII**

Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah yaitu Oleh:

- a. Ayu Kholifah
- b. Eni Nuraeni
- c. Fua Atiqullah
- d. Mukhtar Nasir
- e. Sulhan Hasan



mahir dalam bidang jaringan internet. Kemudian Depinkom diberikan kewenangan untuk:

- Pemblokiran dan filtering terhadap situs-situs yang dianggap membahayakan;
- Cyberattack terhadap orang-orang yang membuat situs tidak senonoh;
- Pengawasan terhadap pengguna internet.

Selain daripada Depinkom yang beraksi, DPR sebagai badan perumus Undang-undang seharusnya menyusun Undang-undang yang lebih tegas menghadapi kebebasan internet ini. Misalnya undang-undang baru yang member sanksi pidana berupa penangkapan terhadap orang-orang yang memposting informasi yang tidak layak dikonsumsi massa. Dengan ini maka saya rasa kebebasan internet tidak akan merajalela seperti sekarang, karena kebebasan terjadi bilamana tidak ada aturan yang menindak dengan tegas. Satu pertanyaan lagi ya bu, apakah ibu yakin konsep ibu akan berhasil?

b. Pendapat Anggota Dewan mengenai Negara yang belum mengatur tentang kebebasan akses Internet

Melihat perkembangan internet dan arus globalisasi yang begitu luar biasa, informasi yang masuk dalam media internet pun tidak terbatas. Banyak informasi yang menjerumuskan atau mengarah ke pornografi. Apakah ibu memiliki konsep yang kemudian diajukan ke DPR RI untuk membatasi informasi yang terkandung di media internet?

Ya, saya sebenarnya khawatir dengan informasi yang banyak dimuat di internet tanpa batas dan tentunya akan berdampak sangat buruk bagi bangsa kita. Saya sebenarnya sudah memiliki konsep untuk diajukan ke DPR RI untuk menyehatkan media informasi internet bangsa kita.

Saya yakin karena sejumlah Negara telah melakukan itu, misalnya Pakistan dan Venezuela. Walaupun banyak dari masyarakat mereka yang memprotes, tapi kebaikan dan kebenaran itu tidak bisa ditawar, harus tetap ditegakkan.

- c. Apakah ada rencana Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cirebon untuk membuat perda yang berkenaan dengan kebebasan berinternet yang tidak sesuai dengan syari'at Islam?

Untuk membentuk perda yang berkenaan dengan Kebebasan Berinternet, hal tersebut tidak menutup kemungkinan dijalankan tahapan-tahapan untuk menuju pembentukan kebijakan tersebut. Karena di Kota Cirebon ini pun, terdapat Perda baru yang telah dibentuk dan sangat mendukung moral dan sikap mental bangsa ini, yakni Larangan Peredaran dan Pengonsumsi Minuman Beralkohol dan juga Kewajiban Diniyah Takmiliah. Sehingga pembentukan Perda yang berkenaan dengan kebebasan berinternet pun dapat diusahakan, karena hal tersebut dapat menjaga dan mendukung moral, budaya luhur bangsa dan seirama dengan syari'at Islam.



## BAB IV KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang pandangan DPRD kota Cirebon sebagai kota wali terhadap kebebasan berinternet yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pandangan DPRD kota Cirebon melalui tujuh fraksi yang berhasil diwawancarai tentang tema mengenai kebebasan berinternet yang Tidak sesuai dengan Syari'at Islam dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat bahwa internet sebagai alat komunikasi canggih zaman modern ini mempunyai kelebihan dan kekurangan atau dampak positif dan negatif, dampak positifnya adalah diantara seorang bisa mengakses perkembangan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, informasi – informasi bisnis dan lain-lain, dampak negatifnya diantaranya pornografi, dan lain-lain, kemudian menurut mereka supaya masyarakat dibenteng dengan agama dan etika tradisi bangsa Indonesia yang ketimuran mengedepan etika yang baik sehingga dengan benteng itu diharapkan masyarakat bisa memfilter jika mau berinternet.
2. Negara / pemerintah yang belum membuat aturan tentang internet yang tidak sesuai dengan syari'at Islam bahwa kebebasan adalah hak asasi manusia selagi tidak merugikan orang lain dan era globalisasi tidak bisa dibendung oleh mereka ada kekhawatiran terhadap nasib bangsa Indonesia umumnya dan kota Cirebon khususnya, Menteri informatika sendiri sebagian tayangan internet yang tidak sesuai dengan keindonesiaan sudah diblokir namun belum maksimal
3. DPRD kota Cirebon sudah mempunyai rencana untuk membuat perda tentang pengaturan internet dan mempunyai rencana untuk di sampai ke tingkat provinsi dan kemudian ke DPR RI

## DAFTAR PUSTAKA

- Cohen Bruce J, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta, tanpa tahun
- Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid II. Jakarta: Konpres. 2005
- H.A.W.Widjaja. 2002.*Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2002
- Meri Yarni.*Fungsi Legislasi DPRD dalam kerangka Otonomi*.Artikel Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.hal 2.tersedia di [www.google.com](http://www.google.com). diakses tanggal 10 November 2013
- Ni'matul huda. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta: UII Pres 2005
- Sadu Wasistiono, dkk, *Meningkatkan Kinerja DPRD*. Bandung Fokusmedia.2009
- Soenobo Wirjosoegito. *Proses & Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2004
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- <http://wong-cerbon.blogspot.com/2007/12/membumikan-cirebon-kota-wali.html>,
- <http://sandyafganisme.blogspot.com/2010/10/landasan-teori.html>,
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Cirebon#Geografi](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Cirebon#Geografi),
- <http://www.cirebonkota.go.id/index.php/pemerintahan/struktur-organisasi/legislatif>